



► PENATAAN KAWASAN
**PKL Malioboro
Minta Relokasi
Diundur**

Sunartono & Sirojul Khefid
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Malioboro meminta relokasi ke tempat baru dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2022 yang jatuh pada Mei mendatang.

Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharna, Rudiarto, berharap pemindahan lapak ke area eks Dinas Pariwisata DIY dan eks Bioskop Indra berlangsung setelah Idulfitri 2022. "Paling tidak memberi kesempatan teman-teman beraktivitas di sana [Malioboro], untuk menutupi keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Serta menyiapkan segala sesuatu, mental, dan sebagainya, karena akan menempati suasana baru," kata Rudiarto, Selasa (4/1).

► Halaman 10



Pekerja melintasi area relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di bekas lahan gedung Dinas Pariwisata, Jl. Malioboro, Jogja, Selasa (4/1).
Harian Jogja/Gigih M. Hanafi

PKL Malioboro...

Sampai saat ini, Rudiarto menganggap belum semua sarana prasarana di sana rampung. Selain pembatas antarlapak yang belum dipasang, akses dari sisi timur juga belum dibuka. Pembatas antarlapak dianggap penting lantaran berpotensi menjadi konflik antarpedagang.

Pemerintah juga perlu memastikan semua PKL pindah tanpa ada lagi yang berjulan di lorong. Menurutnya, karena sifatnya bedol desa, semua harus berjalan serentak. "Sehingga kami siap melaksanakan kalau semua komponennya siap," kata Rudiarto.

"Selain itu perlu menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kota Jogja dan DIY agar PKL bisa hidup seperti halnya hidup di lorong. Perlu ada kiat-kiat dari pemerintah mengundang wisatawan masuk ke selter lapak pedagang," ujarnya.

Anggota Tri Dharma yang berjumlah 920 pedagang akan pindah seluruhnya di selter pedagang eks Dinas Pariwisata DIY. "Semoga tidak mengubah pendapatan di tempat baru. Semoga tidak hanya tampilan Malioboro tapi ekonomi kerakyatannya semakin baik juga, tidak memburuk," katanya.

Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, menyatakan pemindahan PKL sedang dipersiapkan bersama Pemkot Jogja, targetnya pada Januari 2022 ini mulai dilakukan relokasi. Proses itu tentu mengedepankan musyawarah antara pemerintah dengan para PKL. "Tetap jalan dimusyawarahkan baik-baik antara teman di Kota [Pemkot] dan pedagang. Segera kami mulai bulan ini," ujar Aji.

Tanpa Retribusi

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemda DIY, Srie Nurkyatsiwi, menjelaskan berdasarkan pendataan, saat ini ada sekitar 1.700 PKL Malioboro yang resmi terdaftar. PKL masuk data tersebut yang

akan dipindah ke dua lokasi baru.

Menurutnya pemindahan PKL itu muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga mereka tidak dibebani biaya retribusi alias gratis. "Relokasi ini kan dalam rangka penataan di Malioboro. Harapannya setelah relokasi, di sana tetap hidup, bagaimana kehidupan dan penghidupan mereka ini menjadi pertimbangan. Sehingga di sana pun tidak ada retribusi, tidak ada sewa, sementara seperti itu. Dinamikanya akan kami bahas lebih lanjut," katanya se usai menghadiri rapat di kompleks Kepatihan, Selasa.

Siwi menegaskan untuk sementara PKL gratis, menempati tempat relokasi. Namun soal sampai kapan gratisnya, masih akan didiskusikan.

Siwi menyatakan pemerintah telah memikirkan berbagai program agar kondisi PKL bisa terus berkembang ketika nantinya telah direlokasi. Papan petunjuk informasi keberadaan PKL pun akan disiapkan, agar pengunjung Malioboro bisa singgah berbelanja ke kawasan PKL di lokasi relokasi. Program ini akan dijalankan melalui lintas sektor di Pemda DIY, mulai dari Dinas Kebudayaan, UMKM, hingga Dinas Perhubungan. "Tentu harapannya konsep pemda ini bisa terwujud yang mengarah ke kebaikan," ucapnya.

Ia menambahkan sarana prasarana untuk lokasi relokasi PKL di bangunan eks Bioskop Indra terus disiapkan secara bertahap seperti pembenahan jaringan listrik, ketersediaan air, fasilitas Internet, hingga manajemen sampah. Sedangkan di eks gedung Dinas Pariwisata juga telah selesai dibangun. Ia berharap nantinya PKL bisa ikut menata lebih baik lagi. Semua fasilitas sedang dipersiapkan, jika nanti sudah siap, PKL akan segera dipindah.

Ia menilai jangan sampai saat pemindahan dilakukan

tetapi fasilitas belum siap. Meskipun berbagai fasilitas itu tidak bisa disediakan secara langsung 100%, melainkan harus bertahap. "Mungkin fasilitas itu kemarin sudah ada, tetapi tentu kami melihat dinamika di lapangan karena ada yang perlu dibenahi. Karena ini hasil koordinasi antara Pemda DIY, Pemkot Jogja, dan para PKL," katanya.

Sejalan dengan itu Pemda DIY terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Jogja serta pedagang untuk mempersiapkan relokasi para PKL ke dua lokasi tersebut. "Rencana [relokasi] memang di Januari ini, tetapi terkait dengan kapan waktunya, belum bisa kami tetapkan apakah pekan pertama atau kedua, tetapi kami target Januari [semua PKL sudah dipindah]," ucapnya.

Ia mengatakan secara spesifik detail pemindahan dalam proses pembahasan, akan tetapi dipastikan semua jenis PKL mulai dari kuliner, penjual barang kering dan basah akan ditempatkan secara merata di kedua lokasi relokasi. Soal teknis penempatan lapak, baik melalui pengundian atau model lain diserahkan sepenuhnya ke Pemkot Jogja dan komunitas PKL. Siwi menilai kenyamanan PKL harus diutamakan dalam penentuan lokasi masing-masing lapak.

Namun, tidak semua keinginan PKL bisa terpenuhi untuk menempati suatu titik lapak tertentu yang dinilai strategis, sebab adanya keterbatasan tempat. "Di Malioboro ini kan ada banyak komunitas, karena kewenangan Malioboro ada di Kota [Pemkot Jogja] maka kami koordinasi dengan kota. Termasuk siapa akan menempati di mananya nanti kota yang mendiskusikan dengan PKL. Tempat harus dirasa nyaman, jangan sampai [penentuan] kita paksakan, kamu di sini tetapi berdampak pada aktivitas mereka," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005